

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagian dilaksanakan oleh kecamatan.

a. Alokasi Pendanaan

Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp5.716.571.100,00** atau 0,27% dari total APBD 2018 Rp2.072.393.505.735,00. Anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp5.510.224.685,00 atau 95,70%. Alokasi program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.C.2.1
Rincian Program Dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung			
1	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	376.000.000,00	375.499.800,00	99,87
4	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	4.785.571.100	4.579.724.885	95,70
	TOTAL	5.716.571.100,00	5.510.224.685,00	96,39

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan**1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

Pada tahun 2018, pada program ini difokuskan pada dukungan pemenuhan hak anak melalui kegiatan pembentukan forum anak tingkat kecamatan, reorganisasi forum kreatif anak wonosobo atau forkos, peningkatan kapasitas bagi pengurus forkos serta rakor forum anak.

Kegiatan berkelanjutan yang dilakukan untuk pengembangan kota layak anak adalah pembentukan desa ramah anak, sosialisasi sekolah ramah anak, pelatihan

kesiapsiagaan bencana di SMP yang menjadi rintisan sekolah ramah anak, sosialisasi konvensi hak anak bagi puskesmas

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak

Tujuan program ini yaitu untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan.. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam program ini diantaranya penguatan kelembagaan PUG melalui, penguatan tim teknis PUG serta penyempurnaan penyusunan RAD PUG. Untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak telah dilaksanakan kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) melalui kegiatan sosialisasi desa/kelurahan ramah anak, pembentukan forum anak di tingkat kecamatan dan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi OPD dan anggota Dharma Wanita

Basis Komunitas (baskom) sebagai wadah pelayanan dan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tingkat desa memiliki peran strategis dimana korban kekerasan dapat secepatnya mendapatkan layanan karena semua desa sudah memiliki baskom. Seiring dengan dinamika kepengurusan baskom maka pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan workshop penanganan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Wonosobo. Selain Baskom di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga membentuk satu wadah yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), yang mana wadah ini memberikan pelayanan pendampingan dan penyelesaian masalah terhadap korban kekerasan.

Untuk penyediaan data, analisis dan pelaporan data base anak dan perempuan terpilah gender, setiap tahunnya dilakukan up dating data situasi pembangunan gender dan anak yang terangkum dalam aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak).

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Beberapa kegiatan untuk Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan antara lain Sosialisasi tindak kekerasan bagi pengelola basis komunitas serta pengambil keputusan tingkat desa dengan sasaran desa Eorejo Wadaslintang, Kalialang kalibawang dan Grugu kaliwiro, Pelatihan pendampingan kasus, penguatan layanan BASKOM.

Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak anak juga menjadi salah satu prioritas pembangunan. Salah satu permasalahan anak di Kabupaten Wonosobo adalah beralihnya pengasuhan kepada keluarga lain seperti misalnya nenek,saudara bahkan tetangga terdekat karena orang tuanya yang bekerja di luar kota/ luar negeri. Melalui kegiatan Fasilitasi perlindungan tenaga kerja perempuan, telah dilaksanakan

IV.C.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

pembinaan pola asuh bagi keluarga TKI perempuan di Desa Tempuran duwur sapuran, desa bomerto dan kelurahan Kramatan serta pembentukan kelompok bina keluarga TKI Desa Gumelar wadaslintang, desa bomerto kelurahan kramatan wonosobo.

Dibidang ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan keluarga telah dilaksanakan kegiatan, Bimbingan Managemen Kewirausahaan bagi Ekonomi Perempuan dengan sasaran pelaku IR di Desa Pangerejo dan Ngadikusuman Kec. Kertek serta pemberian peralatan modal usaha.

4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan

Perempuan mempunyai hak yang sama dalam program pembangunan. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan peran perempuan dilaksanakan melalui kegiatan PKK dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan maupun kabupaten.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.C.2.2

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Indikator RKPD 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	2018				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Capaian	Satus Capaian	
1	Persentase anggaran responsif gender	%	7,5	6,01	5,43	90,34	◇	15
2	Persentase APBDes Responsif gender dan PUHA	%	17	15	17	100,00	0	20
3	Persentase anak berhadapan dengan hukum yang tertangani	%	100 %	100%	100%	100,00	0	100%
4	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	%	100 %	100%	100%	100,00	0	100%
5	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	100 %	100%	100%	100,00	0	100%
6	Jumlah lembaga layanan aktif tingkat desa	%	13	25	43	172,00	0	75
7	Persentase Lembaga penyedia layanan PP dan PA	%	42,86%	55%	100%	181,82	0	100%
8	Persentase perempuan sebagai	%	54,45%	38,93	45,93	117,98	0	100%

IV.C.2. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	2018				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Capaian	Status Capaian	
	tenaga profesional							
9	Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen	%	6,60%	6,04	6,66	110,26	0	8.44%
10	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	46,99%	45,63%	49,04%	107,47	0	50%
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,41%	66,51	67,55	101,56	0	70
12	Rasio KDRT perempuan	%	1,56	4,5	1,64	164	0	5
13	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	%	90,88%	97,89	92,58	94,57	◇	100
14	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	%	2,29	3,02	2,53	116,23	0	3.5
15	Persentase desa ramah anak	%	3,39%	4,90%	4,15%	84,69	◇	10%
16	Persentase puskesmas ramah anak	%	66,67%	24,60%	66,67%	275	0	40%
17	Persentase Sekolah Ramah Anak	%	2	6%	5,86%	97,66	◇	

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - $99,99\%$
●●●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△△△△	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Pada tahun 2018, pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil memperoleh penghargaan tertinggi Anugerah Parahita Ekapraya kategori mentor, yaitu penghargaan yang diberikan Pemerintah RI kepada kementerian maupun kepala daerah yang berkomitmen dan mampu mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender serta pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam implementasi pengarusutamaan gender diwujudkan melalui penyusunan berbagai kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penguatan kelembagaan dalam melaksanakan program PUG dan Perlindungan Anak, yakni pembentukan Tim Teknis Pokja PUG, pembentukan Kelompok Kerja PUG, pembentukan

IV.C.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gender Focal Point serta peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (PUG) melalui Forum Kesenjangan dan Keadilan Gender (FKKG).

Afirmasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses Lembaga pemerintahan serta pengambilan keputusan, pada tahun 2018 telah diterbitkan peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang BPD, bahwa dalam keanggotaan BPD harus ada keterwakilan perempuan, paling sedikit 1 (satu) orang. Dengan demikian, pada tahun 2018, telah terpilih 236 perwakilan perempuan sebagai anggota BPD se-Kabupaten Wonosobo.

Peranan perempuan dalam pembangunan yang lebih luas ditandai dengan semakin terbukanya peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam penciptaan output perekonomian dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan kapabilitas perempuan sebagai bagian dari angkatan kerja yang mempunyai peranan yang penting. Partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, yang artinya semakin banyak perempuan yang memasuki dunia kerja/ usaha. Pengembangan Industri rumahan yang telah dikembangkan di Kabupaten Wonosobo membuka peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas usahanya serta membuka peluang kerja bagi perempuan di sekitarnya.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dilakukan antara lain :

**Tabel IV.C.2.3 Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Tenaga pelaksana yang berkompeten menangani dan memberikan pelayanan serta pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terbatas, baik dari sisi medis, psikologis, psikososial maupun hukum.	Diperlukan kerjasama dan pelibatan pihak-pihak luar yang berkompeten dalam masalah perlindungan perempuan dan anak seperti GOW, TP PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama Instansi vertikal (Aparat Penegak Hukum) terutama dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak
2.	Masih ada pemahaman bahwa perencanaan penganggaran responsive gender hanya urusan OPD pengampu urusan tertentu saja.	Meningkatkan sensitifitas isu gender bagi aparatur melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

IV.C.2. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No.	Permasalahan	Solusi
3	Belum adanya sistem yang kuat untuk mengikat masing-masing OPD untuk melaksanakan perencanaan kegiatan yang responsif gender	Perlu pendampingan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di semua OPD yang terkait, karena pada prinsipnya program dan kebijakan responsif gender masih perlu diintegrasikan ke dalam seluruh bidang pembangunan melalui berbagai kegiatan di berbagai SKPD yang terkait
4.	Konsep dan strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) belum sepenuhnya difahami oleh semua pihak, sehingga kurang maksimal dalam implementasinya.	- Pelembagaan isu pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sampai ke desa. - Perluasan implementasi kebijakan Kota Layak Anak dengan aksi yang lebih aplikatif, mudah dilaksanakan dan memberikan efek langsung pada pemenuhan hak anak.
5.	Data dan informasi sangat menunjang implementasi strategi PUG, terutama data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang belum semua terdokumentasikan dengan baik.	Mengoptimalkan advokasi terpadu untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan dan program pembangunan.